

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dan terbesar ke-4 di dunia dengan total penduduk sebanyak 255.993674 jiwa atau 3,5% dari jumlah penduduk dunia (CIA World Factbook, 2015). Seperti negara berkembang pada umumnya, jumlah penduduk Indonesia yang banyak tersebut memiliki berbagai permasalahan baik dari sektor sosial, ekonomi, dan kesehatan.

Dari total keseluruhan masyarakat Indonesia, sebagian kecil terdiri dari penyandang disabilitas. Disabilitas dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yaitu setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka panjang yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Sering kali dikaitkan dengan masalah keterbatasan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan, penyakit, dan anggapan lain yang membuat penyandang disabilitas cenderung memperoleh persepsi negatif yang mengarah pada diskriminasi (Badriyani dan Riani, 2014). Disabilitas dapat dilatarbelakangi oleh masalah kesehatan sejak lahir, penyakit kronis, cedera akibat kecelakaan, perang, kerusuhan, bencana, dan sebagainya.

Keterkaitan yang erat antara disabilitas dengan kesehatan fisik maupun mental merupakan pandangan umum di masyarakat. Namun, sebenarnya disabilitas merupakan isu multisektor yang tidak hanya terikat pada sektor kesehatan saja, melainkan juga pada sektor sosial dan ekonomi. *Social model of disability* mengemukakan bahwa hambatan sistemik, sikap negatif dan eksklusif oleh masyarakat (secara sengaja atau tidak sengaja) merupakan faktor-faktor utama yang menyebabkan perbedaan antara penyandang disabilitas dengan masyarakat non-disabilitas (Tarsidi, 2012).

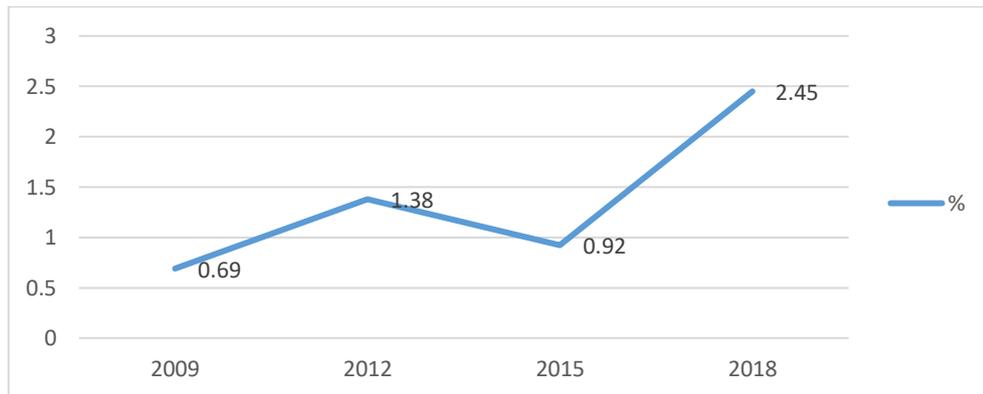
Hubungan antara disabilitas dan kemiskinan masih sangat kuat, seperti hasil penelitian dari WHO (World Health Organization) yang mengatakan bahwa kemiskinan di kalangan penyandang disabilitas terus meningkat yang mengacu pada tingkat kecacatan terhadap kemiskinan. Meskipun hubungan di antara penyandang disabilitas dan kemiskinan sangat erat, tetapi belum dapat dipastikan perbedaan mekanisme yang mendasari hal tersebut di berbagai negara (Eide dan Ingstad, 2011).

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terhadap diskriminasi terutama dalam akses ketenagakerjaan di Indonesia. Sebagian masyarakat tidak sepenuhnya mendukung serta memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam urusan pekerjaan. Sebagian masyarakat masih berpandangan bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok yang lemah dan hanya dapat bergantung kepada orang lain di sekitarnya (Wijayanto, 2015).

Sebagai warga Negara Indonesia penyandang disabilitas juga mempunyai hak dan kewajiban serta peran yang sama dengan warga negara lainnya. Hal tersebut di jamin dalam UUD 1945 pasal 28 C ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya demi meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya.

Stigma yang terlanjur melekat di sebagian besar masyarakat adalah bahwa penyandang disabilitas tidak bisa produktif, dikasihani dan terkucilkan. Meskipun banyak penyandang disabilitas yang sebenarnya mampu dan ingin bekerja sehingga dapat hidup mandiri seperti masyarakat pada umumnya. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada perekonomian penyandang disabilitas yang semakin tergantung dengan orang lain dan semakin terpuruk.

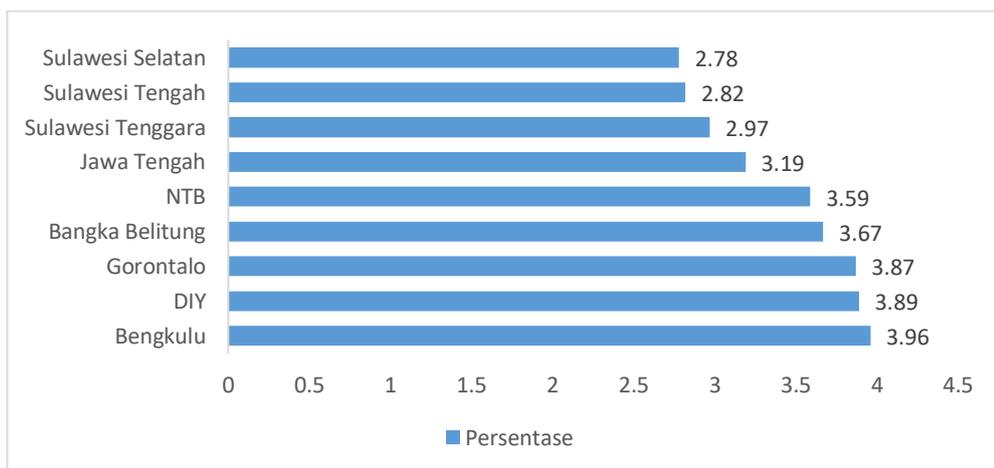
Di Indonesia sendiri, jumlah penyandang disabilitas mengalami peningkatan cukup tinggi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. menurut data *World Health Organization* pada tahun 2010 jumlah penyandang disabilitas mengalami peningkatan mencapai 10-15% dari jumlah penyandang disabilitas di tahun 2012 yang yang mencapai 1,38% dari total seluruh penduduk Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari persentase jumlah penyandang disabilitas yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.



Sumber: BPS, 2018

Gambar 1.1.
Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas di Indonesia 2009 - 2018

Data penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan Susenas tahun 2018 memperoleh hasil sebesar 2,45% penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Peningkatan dan penurunan persentase penyandang disabilitas dipengaruhi oleh adanya perubahan konsep dan definisi pada Susenas 2009 dan 2015 yang masih menggunakan konsep kecacatan, sedangkan Susenas 2012 dan 2018 telah memasukkan konsep disabilitas.



Sumber: BPS, 2018

Gambar 1.2.
Persentase 10 Besar Provinsi Dengan Penyandang Disabilitas Terbanyak Tahun 2018

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2018, dari 10 wilayah di Indonesia dengan penyandang disabilitas, Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada urutan ke 2 terbanyak setelah Bengkulu. Hal ini tentu merupakan sebuah tantangan tersendiri baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut data dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY (2018), jumlah penduduk DIY menurut disabilitas yang tersebar di seluruh kabupaten/kota adalah sebanyak 9.741 orang dengan rincian 5.143 laki-laki dan 4.598 perempuan.

Tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas di Indonesia termasuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bisa dikatakan masih rendah (Surwanti dan Ma'ruf, 2018). Sleman merupakan salah satu kabupaten di DIY dengan jumlah penyandang disabilitas 1.844 orang yang tersebar di seluruh kecamatan di daerah tersebut. Dari 17 kecamatan yang ada di daerah Sleman, Ngaglik merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sleman dengan persebaran penyandang disabilitas ada di seluruh desa di kecamatan tersebut.

Tabel 1.1.
Jumlah Penyandang Disabilitas Kecamatan Ngaglik
Tahun 2018

Desa	Fisik		Netra		Rungu		Mental		Fisik/ Mental		Lainnya		Total	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Sariharjo	0	1	1	1	2	2	0	4	0	0	4	1	7	9
Minomartani	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	5	2
Sinduharjo	1	1	0	1	1	0	2	3	0	2	0	1	4	8
Sukoharjo	1	3	0	0	2	1	1	4	0	1	0	0	4	9
Sardonoharjo	3	3	0	0	2	1	3	2	1	0	3	0	12	6
Donoharjo	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	2	4
Jumlah	8	9	1	2	7	4	9	15	1	5	8	3	34	38

Sumber: Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman

Pada tabel 1.1., jumlah penduduk disabilitas di Kecamatan Ngaglik, Sleman adalah sebanyak 72 orang dengan rincian 34 laki-laki dan 38 perempuan. desa di Kecamatan Ngaglik memiliki penyandang disabilitas. Adapun jenis disabilitas yang paling banyak adalah disabilitas mental dengan total 24 orang, sedangkan yang paling sedikit adalah disabilitas netra dengan total 3 orang.

Kondisi penyandang disabilitas yang cukup memprihatinkan, menjadi latar belakan dibentuknya perkumpulan bernama Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia wilayah Ngagglik yang selanjutnya dikenal dengan PPDI Ngaglik. Berawal dari sebuah perkumpulan biasa yang diinisiasi 5 orang pada tahun 2013, PPDI Ngaglik masih barjalan hingga saat ini. Beberapa program telah dijalankan oleh PPDI Ngaglik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan ekonomi para anggota.

Berbagai cara dilakukan agar organisasi tersebut dapat berjalan dan memiliki sumber pendapatan. Usaha-usaha pernah coba untuk dijalankan seperti ternak lele, ternak lebah, bercocok tanam. Namun usaha-usaha tersebut tidak berjalan karena terkendala oleh banyak hal. Tidak berhenti sampai disitu PPDI Ngaglik sebagai organisasi yang memiliki tujuan untuk memberdayakan para anggotanya terus mencari solusi.

Salah satu program yang kemudian dijalankan dengan tujuan peningkatan perekonomian anggota PPDI Ngaglik adalah Koperasi Simpan Pinjam Bangun Kemandirian Difabel yang selanjutnya dikenal dengan KSP Bank Difabel. Program KSP Bank Difabel sudah berjalan sejak tahun 2015.

Seluruh pengurus KSP Bank Difabel adalah penyandang disabilitas PPDI Ngaglik dan didampingi oleh beberapa orang yang ahli di bidang perkoperasian. Berawal dari dana patungan anggota, KSP Bank Difabel memulai langkah awal hingga memperoleh hibah dana dari para dermawan.

KSP Bank Difabel sebagai salah satu program dari PPDI Ngaglik diharapkan dapat meningkatkan pendapatan organisasi dan rumah tangga anggota. Rumah tangga merupakan lingkup terkecil dalam kehidupan masyarakat. Rumah tangga sebagai dasar unit dari kehidupan masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan seorang individu. Meskipun menjadi lingkup terkecil, tetapi rumah tangga memiliki tanggung jawab atas terlaksananya pembangunan nasional. Dalam pengukuran keberhasilan dan kesuksesan rumah tangga dikaitkan dengan pendapatan rumah tangga tersebut (Masithoh, dkk, 2016).

Penelitian mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas sebelumnya telah dilakukan oleh Yulia (2018). Dalam penelitian Yulia (2018) didapatkan hasil bahwa Yayasan Penyandang Cacat Mandiri sebagai pendamping dalam pemberdayaan kelompok difabel di bidang ekonomi kreatif memiliki peran sebagai motivator. YPCM berusaha membangkitkan keyakinan atau kekuatan penyandang disabilitas sehingga dapat membangun kepercayaan diri penyandang disabilitas untuk dapat hidup mandiri dari segi ekonomi.

Selain itu, Gafara (2017) telah melakukan penelitian mengenai peran karang taruna dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dan implikasinya

terhadap ketahanan ekonomi keluarga penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa karang taruna memiliki peran dalam mendorong partisipasi seluruh elemen masyarakat untuk membantu penyandang disabilitas untuk mencapai kesejahteraan. Selain itu, kegiatan pemberdayaan juga telah memberi kontribusi pada peningkatan pendapatan penyandang disabilitas. Namun demikian, meski mengalami peningkatan dalam hal pendapatan, kondisi ketahanan ekonomi keluarga penyandang disabilitas masih dalam garis kemiskinan.

Koperasi simpan pinjam merupakan satu dari banyak lembaga keuangan bukan bank yang memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang dimaksud tersebut berupa penyaluran pinjaman dan menerima simpanan. Dalam penyaluran pinjaman dan simpanan oleh koperasi simpan pinjam, ruang lingkup kegiatan tersebut secara umum adalah kepada anggota koperasi sendiri. Koperasi simpan pinjam dapat menghimpun dana baik dari anggota maupun bukan anggota dalam bentuk simpanan dan pinjaman untuk modal usaha (Andriani, 2018).

Keberadaan koperasi simpan pinjam menjadi sangat krusial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Terlepas dari kebutuhan akan pinjaman dan tempat menyimpan kekayaan, koperasi memiliki prinsip gotong royong yang mengedepankan kesejahteraan anggota (Hudiyanto, 2014). Koperasi simpan pinjam didirikan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga yang ringan

dengan syarat setiap anggota dapat bertanggung jawab dengan kewajibannya (Ninik, 2007).

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Oleh sebab itu, koperasi dapat diartikan sebagai wujud perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Peran koperasi dalam masyarakat begitu penting sebab keberadaan beberapa koperasi telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Krisnamukti (2002) yang mengatakan bahwa terdapat tiga bentuk eksistensi koperasi dalam kehidupan masyarakat, yaitu:

1. Koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu yang diperlukan oleh masyarakat
2. Koperasi menjadi alternatif bagi usaha mikro kecil dan menengah dengan bantuan pemberian pinjaman
3. Koperasi menjadi organisasi yang dimiliki anggotanya dimana faktor ketiga ini merupakan faktor yang menjadi tumpuan sehingga koperasi dapat melewati berbagai kondisi yang sulit.

Penelitian mengenai pengaruh koperasi simpan pinjam sebelumnya telah dilakukan oleh Nugroho (2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pendidikan perkoperasian terhadap

partisipasi anggota, terdapat pengaruh positif dan signifikan pelayanan koperasi terhadap partisipasi anggota, dan secara bersama-sama terdapat pengaruh positif dan signifikan pendidikan perkoperasian dan pelayanan koperasi terhadap partisipasi anggota.

Nining (2018) melakukan penelitian mengenai peran koperasi simpan pinjam dalam mengembangkan usaha mikro. Hasil penelitian Nining menyebutkan bahwa koperasi memiliki peranan dalam mengembangkan usaha anggota hal ini terlihat dari aspek finansial koperasi dalam proses pemberian pinjaman dengan persyaratan yang mudah tanpa memberatkan anggota dan bunga pemberian pinjaman sangat rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya serta dilihat pula dari tata kelola manajemen koperasi dalam mengembangkan usaha anggota, koperasi menggunakan metode-metode baru dengan menggunakan teknologi guna mendukung pengelolaan keuangan, pengelolaan usaha, dan aset.

Selain itu, Nasution (2018) juga melakukan penelitian mengenai peran koperasi simpan pinjam. Hasil penelitian Nasution menyebutkan bahwa koperasi memiliki pengaruh positif terhadap UMK, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator seperti peranan koperasi bagi anggota yang bermanfaat meningkatkan omset produksi, peranan koperasi penyaluran kredit yang mengalami peningkatan pada tahun 2014-2016, juga peranan peningkatan omset setelah meminjam sebesar 88%.

Kegiatan KSP Bank Difabel selain menyalurkan kredit pada anggota, juga mengadakan pelatihan kewirausahaan, dan pendidikan perkoperasian bagi anggota. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merasa perlu dilakukan penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Kredit, Pelatihan Kewirausahaan, dan Pendidikan Perkoperasian terhadap Pendapatan Rumah Tangga Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Bangun Kemandirian Difabel)”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian dimana peneliti melakukan penelitian terhadap pengaruh kredit, pelatihan kewirausahaan, dan pendidikan perkoperasian terhadap pendapatan rumah tangga penyandang disabilitas yang tergabung dalam Koperasi Simpan Pinjam Bangun Kemandirian Difabel.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah penelitian di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kredit terhadap pendapatan rumah tangga penyandang disabilitas yang tergabung dalam Koperasi Simpan Pinjam Bangun Kemandirian Difabel?

2. Bagaimana pengaruh pelatihan kewirausahaan terhadap pendapatan rumah tangga penyandang disabilitas yang tergabung dalam Koperasi Simpan Pinjam Bangun Kemandirian Difabel?
3. Bagaimana pengaruh pendidikan perkoperasian terhadap pendapatan rumah tangga penyandang disabilitas yang tergabung dalam Koperasi Simpan Pinjam Bangun Kemandirian Difabel?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kredit terhadap pendapatan rumah tangga penyandang disabilitas yang tergabung dalam Koperasi Simpan Pinjam Bangun Kemandirian Difabel
2. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan kewirausahaan terhadap pendapatan rumah tangga penyandang disabilitas yang tergabung dalam Koperasi Simpan Pinjam Bangun Kemandirian Difabel
3. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan perkoperasian terhadap pendapatan rumah tangga penyandang disabilitas yang tergabung dalam Koperasi Simpan Pinjam Bangun Kemandirian Difabel

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan dapat mengaplikasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan

b. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau bahan acuan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut di bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan mengenai pengaruh kredit, pelatihan manajemen usaha, dan pendidikan perkoperasian KSP Bank Difabel terhadap tingkat pendapatan penyandang disabilitas di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta bagi masyarakat. Serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan KSP Bank Difabel.